

Rancangan Akhir RENJA 2021

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Brigjen Katamso No. 2 Telp. (0536) 3229663, Fax (0536) 3220517 Tromol Pos 41
PALANGKA RAYA 73112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (provinsi) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (PD) dan Musrenbang tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah 2021 yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (PD).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah (PD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah **”Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah”**. Sesuai dengan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) **Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal.**
- 2) **Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.**
- 3) **Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam skala Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4; tambahan lembaran Daerah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021.

24. Surat Sekretaris Daerah Nomor 059/105/II/Bapplitbang tanggal 11 Februari 2020 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan atau instansi yang membidangi fungsi kelautan dan perikanan Kabupaten/kota se Kalimantan Tengah dalam penyusunan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2021;
- b. Penyusunan usulan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
- c. Penyusunan usulan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) alokasi Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor Kelautan dan Perikanan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (PD)

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (PD), memuat kajian (review) terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2018 dan perkiraan capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan Tahun 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (PD) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD), memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (PD)

Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (PD) memuat uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah (PD), Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD), Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah (PD) maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah (PD).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (PD)

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah (PD)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini berisi penjelasan-penjelasan mengenai:

- ❑ Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal :
 - ✓ Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
 - ✓ Pencapaian MDGs
 - ✓ Pengentasan kemiskinan
 - ✓ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- ❑ Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
 - ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan dan program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2019 dan perkiraan target Tahun 2020. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

B.1. Evaluasi Program Tahun 2019

Evaluasi Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dilakukan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan program yang dilaksanakan melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Total Anggaran Belanja Langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 28.293.114.770,- (termasuk Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan) untuk melaksanakan 11 program terdiri dari 5 program bersifat rutin dan 6 program prioritas dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir Triwulan IV (31 Desember 2019) Rp. 27.564.448.215,22 atau 97,42 %, sedangkan capaian kinerja fisik sebesar 100 %. Jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, hasil pencapaiannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian IKU	Target	Capaian	(%)
1.	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	130.526,10	133.351,22*	102,16
2.	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	110.842,40	100.605,53*	90,75
3.	Jumlah produksi benih (ekor)	64.410.000,00	38.260.55*	59,40
4.	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	53,30	53,30*	100
5.	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	61.362,24	61.362,24	100
6.	Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	2,50	2,50	100
7.	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	80,00	80,00	100
8.	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	40	41	102,5

Berdasarkan tabel tersebut di atas terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan, yang secara umum dikarenakan beberapa permasalahan yang dihadapi untuk pengembangan bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Tengah, yaitu :

1. Perluasan kawasan dan usaha budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal, sehingga kegiatan budidaya menjadi terkesan padat modal dan resiko tinggi, sehingga perkembangannya cenderung lambat dibandingkan dengan sektor penangkapan ikan di laut.
2. Masih cukup rendahnya kemampuan Unit Pembenuhan Rakyat (UPR) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan dalam memproduksi benih berkualitas yang kemudian berdampak pada sangat tergantungnya pembudidaya lokal kepada pembenuh yang berasal dari luar Kalteng, yang kembali berpengaruh pada tingginya biaya produksi;

3. Harga pakan pabrikan tinggi sehingga menyebabkan biaya produksi tinggi;
4. Masih rendahnya kesadaran dan penerapan teknologi terbaru dalam pembudidayaan ikan, yang kemudian mengakibatkan rendahnya kemampuan pembudidaya dalam mencegah dan mengatasi perubahan gejala alam dan serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya di Daerah Aliran Sungai (DAS);
5. Skala produksi olahan hasil perikanan di Kalimantan Tengah masih di skala industri rumah tangga, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah;
6. Masih sering terjadi pengrusakan wilayah pesisir dan sumber daya ikan oleh masyarakat akibat kurangnya pemahaman masyarakat pesisir mengenai pentingnya upaya memelihara lingkungan;
7. Masih diperlukan optimalisasi sarana dan prasarana bagi POKMASWAS

B.2. Perkiraan Pencapaian Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Total Belanja Langsung sebesar Rp. 25.482.723.750,- dimana terjadi penurunan sebesar -9,93 % bila dibandingkan dengan anggaran Belanja Langsung tahun anggaran 2019 Rp. 28.293.114.770,-. Dari total anggaran tahun 2019 tersebut terurai dalam 11 program, diharapkan keberhasilan kinerja dapat mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2019, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Pada Tahun 2019 target Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Uraian IKU	Target	Capaian	(%)
1.	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	130.526,10	130.526,10	100,00
2.	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	116.384,52	116.384,52	100,00
3.	Jumlah produksi benih (ekor)	67.630.000	67.630.000	100,00
4.	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	49,12	49,12	100,00
5.	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	171.679,00	171.679,00	100,00
6.	Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	2,50	2,50	100,00
7.	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	78,00	78,00	100,00

No	Uraian IKU	Target	Capaian	(%)
8.	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	40	30,00	100,00

Untuk mencapai target tersebut, maka arah pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal
2. Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
3. Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sedangkan Program teknis strategis yang akan dilaksanakan, untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap
2. Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan
3. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir
4. Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Tengah

PD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Urusan Pilihan									
	Bid. Urusan Kelautan dan Perikanan									
3.01-1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang disediakan (surat)	7.500,00	4.500,00	1500,00	1.500,00	100,00	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan komunikasi, air, dan listrik bagi aparatur internal SKPD (bulan)	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	100,00
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit)	75,00	45,00	15,00	15,00	100,00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15	100,00
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah polis asuransi gedung kantor dinas (polis)	10,00	6,00	2,00	2,00	100,00	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	2	100,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasioal yang mendapat pemeliharaan dan perizinan (unit)	75,00	45,00	15,00	15,00	100,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15	100,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan layanan jasa administrasi keuangan PD (bulan)	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	100,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan layanan jasa kebersihan kantor (bulan)	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	100,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	75,00	45,00	15,00	15,00	100,00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15	100,00

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan layanan penyediaan ATK (bulan)	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	Penyediaan alat tulis kantor	12	100,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	12	100,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung Kantor yang disediakan (jenis)	40,00	24,00	8,00	8,00	100,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8,00	100,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (unit)	35,00	21,00	7,00	7,00	100,00			
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (media bacaan)	120,00	72,00	24,00	24,00	100,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24,00	100,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan atau snack rapat/ tamu	7.500,00	4.500,00	1500,00	1.500,00	100,00	Penyediaan makanan dan minuman	1500,00	100,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan (orang kali)	65,00	39,00	13,00	13,00	100,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	13,00	100,00
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan (orang kali)	80,00	48,00	16,00	16,00	100,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	13	100,00
3.01-2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16 orang kali	100,00
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (buah)	360,00	216,00	72,00	72,00	100,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kebutuhan kantor yang diadakan (Buah)	210,00	126,00	42,00	42,00	100,00			
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (gedung)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit)	80,00	48,00	16,00	16,00	100,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16,00	100,00
30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan (unit)	15,00	9,00	3,00	3,00	100,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	72	100,00
42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			
45	Pengadaan komputer	Jumlah komputer/notebook yang diadakan (unit)	10,00	6,00	2,00	2,00	100,00			
194	Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	Paket pekerjaan penataan taman dan kebersihan serta kebun hortikultura	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			
3.01-3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas Aparatur Sipil Negara yang diadakan (stell)	800,00	480,00	160,00	160,00	100,00			
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan (stell)	800,00	480,00	160,00	160,00	100,00			
9	Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	Jumlah pakaian Batik Tradisional yang diadakan sebagai pakaian dinas hari tertentu Aparatur Sipil Negara (stell)	800,00	480,00	160,00	160,00	100,00			

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
3.01-5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42	100,00
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN dinas yang mengikuti bimbingan teknis (orang)	50,00	30,00	10,00	10,00	100,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1	100,00
3.01-6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16	100,00
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis anggaran dinas yang disusun (laporan)	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3	100,00
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun (laporan)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	100,00
6	Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang tersusun (dokumen)	20,00	12,00	4,00	4,00	100,00	Penyusunan RKA-SKPD	2	100,00
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen/ laporan hasil monev yang disusun (dokumen)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		
14	Penyusunan LAKIP	Jumlah laporan kinerja dinas yang disusun (laporan)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Penyusunan LAKIP	1	100,00
15	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dinas yang disusun (laporan)	10,00	6,00	2,00	2,00	100,00	Penyusunan renja SKPD		
29	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas	Jumlah Laporan Tahunan dinas yang disusun (laporan)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas	160	100,00

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
35	Penyusunan LKPJ dan LPPD	Jumlah laporan LKPJ dan LPPD dinas yang disusun (laporan)	10,00	6,00	2,00	2,00	100,00	Penyusunan LKPJ dan LPPD		
77	Penyusunan Laporan Data Statistik Perikanan	Jumlah dokumen data statistik/ informasi perikanan yang disusun (dokumen)	5,00	3,00	1	1	100,00	Penyusunan Laporan Data Statistik Perikanan	160	100,00
3.01-8	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah							Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah dokumen laporan pendataan aset milik dinas (dokumen)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	10	100,00
3.01-21	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	130.526,10					Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap	130.526,10	
1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah sarana penangkapan ikan bagi nelayan perairan laut yang disediakan (Unit)	40,00	24,00	8,00	8,00	100,00	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	12	100,00
32	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut	Jumlah sarana penangkapan ikan bagi nelayan perairan umum yang disediakan (unit)	2.250,00	1.350,00	450,00	450,00	100,00	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut	1	100,00
34	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Perairan Umum Daratan	Jumlah Sarpras pengelolaan pelabuhan perikanan yang disediakan (unit)	10,00	6,00	2,00	2,00	100,00	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Perairan Umum Daratan	4	100,00
37	Monitoring Evaluasi Sumber Daya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring keberadaan sumberdaya ikan di perairan yang disusun (laporan)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Monitoring Evaluasi Sumber Daya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI	1	100,00
39	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perairan Umum Daratan dan Laut	Jumlah kelompok pengelolaan SDI di PUD yang dibentuk (kelompok)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap	1	100,00

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
42	Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah perijinan perikanan tangkap yang dikelola dengan baik (perijinan)	50,00	30,00	10,00	10,00	100,00			
45	Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan	Jumlah kawasan PUD yang dilakukan pengkayaan stok (kawasan)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			
47	Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsi Pelabuhan Perikanan (DAK)	Jumlah Sarpras dermaga yang dibangun/direhab (paket)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsi Pelabuhan Perikanan (DAK)	2	100,00
48	Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kumai	Jumlah bulan layanan kepelabuhanan perikanan (bulan)	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kumai	1	100,00
49	Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang	Jumlah bulan layanan kepelabuhanan perikanan (bulan)	60,00	36,00	12,00	12,00	100,00	Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang	2	100,00
50	Peningkatan Tata Kelola Pelabuhan Perikanan	Terkelolanya pelabuhan perikanan (pelabuhan)	35,00	21,00	7,00	7,00	100,00	Peningkatan Tata Kelola Pelabuhan Perikanan	1	100,00
								Supervisi dan Pembinaan Pelabuhan Perikanan		
3.01-25	Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan	Angka konsumsi ikan (kg/ kap)	48,61					Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan		
3	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan Gemarikan (orang)	2.500,00	1.500,00	500,00	500,00	100,00	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	500,00	100,00
9	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil	Jumlah kelompok unit pengolahan skala kecil yang mendapatkan bantuan (kelompok)	15,00	9,00	3,00	3,00	100,00	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil	8	100,00

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
13	Pameran dan promosi produk perikanan	Jumlah keikutsertaan dinas dalam rangka pameran dan promosi produk perikanan (kali)	20,00	12,00	4,00	4,00	100,00			
25	Operasi Pasar	Jumlah ikan segar yang dipasarkan dalam rangka keikutsertaan dalam kegiatan pengendalian inflasi di Kalteng (kg)	15.000,00	9.000,00	3000,00	3.000,00	100,00			
27	Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Bagi Unit Pengolahan Ikan	Jumlah Unit Pengolah Ikan yang difasilitasi sertifikasi kelayakan pengolahannya (unit/ kelompok)	25	15	5	5	100,00			
3.01-26	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)	171.679,00					Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir		
		Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)	2,50							
13	Penataan Kawasan Wilayah Pesisir	Jumlah luasan kawasan yang direhabilitasi (Ha)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Penataan Kawasan Wilayah Pesisir	2 100,00	
18	Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut	Tersedianya dokumen tata ruang zonasi wilayah pesisir Kalteng (dokumen)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			
19	Rehabilitasi dan Ekstensifikasi Terumbu Karang	Lestarnya kawasan konservasi perairan daerah taman wisata perairan senggora sepagar dan laut sekitarnya (kawasan)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
21	Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan Konservasi	Jumlah lokasi (lokasi)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			
22	Adopsi Teknologi dan Pembelajaran ke Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Laut	ASN dan masyarakat pesisir yang mengikuti pembelajaran (orang)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			
23	Pembinaan Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi	Jumlah kelompok yang terbina (kelompok)	20,00	12,00	4,00	4,00	100,00			
24	Identifikasi/Inventarisasi Potensi Limbah Hasil Perikanan Yang Dapat Dimanfaatkan Ulang di Kawasan Pesisir	Jumlah kelompok yang terbina (kelompok)	35,00	21,00	7,00	7,00	100,00			
25	Adopsi Teknologi dan Pembelajaran ke Pengrajin/Komunitas Pengolah Limbah Hasil Perikanan	Jumlah ASN yang mengikuti pembelajaran (orang)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			
27	Pembinaan Kelompok Wanita Pengolah Limbah Hasil Perikanan Di Kawasan Wisata Ujung Pandaran	Jumlah kelompok yang terbina (kelompok)	15,00	9,00	3,00	3,00	100,00			
28	Koordinasi/Evaluasi/Pembinaan Terkait Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan Dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Pesisir	Jumlah Kabupaten (Kabupaten)	35,00	21,00	7,00	7,00	100,00	Koordinasi/Evaluasi/Pembinaan Terkait Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan Dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Pesisir	1	100,00
29	Gerakan Bersih Pantai dan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir	Jumlah kawasan (kawasan)	10,00	6,00	2,00	2,00	100,00			

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (outcome)/ Kegiatan (output) Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
30	Penyusunan Rencana Pengelolaan Wisata Mangrove	Tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Wisata Mangrove (dokumen)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			
								Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kawasan Konservasi (DAK)	1	100,00
								Sosialisasi Kawasan Konservasi dan Rencana Pengelolaan serta aturan Zona	10	100,00
3.01-27	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)	80					Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		
		Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)	40							
6	Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah operasi pengawasan yang dilaksanakan (kali operasi)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)	1	100,00
7	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi penanganan tindak pidana perikanan (kali)	55,00	33,00	11,00	11,00	100,00	Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan	12	60,00
9	Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak	Jumlah UPI dan Pokdakan (kelompok)	25,00	15,00	5,00	5,00	100,00	Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan	12	100,00

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
10	Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan (paket)	55,00	33,00	11,00	11,00	100,00	Pembentukan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1	100,00
11	Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan	Jumlah lokasi pemantauan pemanfaatan sumberdaya kelautan (lokasi)	150,00	90,00	30,00	30,00	100,00			
13	Pembentukan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah pokmaswas (kelompok)	150,00	90,00	30,00	30,00	100,00			
3.01-29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	110.842,40					Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya		
		Jumlah produksi benih (ekor)	64.410.000,00							
8	Gerakan Pakan Mandiri	Terlaksananya kegiatan gerakan pakan mandiri (kegiatan)	25,00	15,00	5,00	5,00	100,00			
16	Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil	Jumlah bantuan benih ikan (ekor)	5.000.000,00	3.000.000,00	1000000,00	1.000.000,00	100,00	Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil	48,61	

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
								Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)	500	100,00
35	Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran	Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan (paket)	150.000,00	90.000,00	30000,00	30.000,00	100,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran	3	100,00
36	Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai	Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan (paket)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai	4	100,00
38	Pendataan dan Pembinaan Kelompok Pembudidaya Di Kawasan Pesisir Dan Laut	Tersedianya data dan terbinannya kelompok pembudidaya (kelompok)	25,00	15,00	5,00	5,00	100,00			
39	Gerakan Pakan Mandiri Di Kawasan Pesisir Laut	Terlaksananya kegiatan gerakan pakan mandiri (kegiatan)	25,00	15,00	5,00	5,00	100,00			
40	Pembinaan dan Pendampingan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) Di Kawasan Pesisir Dan Laut	Terbinanya kelompok pembudidaya (kelompok)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Pembinaan dan Pendampingan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) Di Kawasan Pesisir Dan Laut	3.000	100,00
41	Pengumpulan dan Pengelolaan Data Sasaran dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya	Tersedianya data produksi perikanan budidaya (dokumen)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			
42	Pengembangan Budidaya Di Kawasan Pesisir Dan Laut	Jumlah kawasan (kawasan)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00	Pengembangan Budidaya Di Kawasan Pesisir Dan Laut	5 UPI	100,00

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>) Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD Tahun 2019			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2019	Realisasi Renja PD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
43	Koordinasi dan Monitoring Ke UPTD/UPR/Pembudidaya Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Di Kawasan Pesisir Laut	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan monitoring (kegiatan)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			
44	Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah paket pengembangan perikanan budidaya	15,00	9,00	3,00	3,00	100,00	Pengembangan Perikanan Budidaya	3,00	100,00
45	Pendampingan dan Monev Bantuan Pemerintah	Terlaksananya monev bantuan pemerintah (kabupaten)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			
46	Pembinaan dan Bimbingan Teknis dan Pembekalan Kepada Kelompok Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI)	Jumlah kelompok yang terbina (kelompok)	25,00	15,00	5,00	5,00	100,00			
47	Pembinaan UPR/UPTD BBI Dalam Rangka Sertifikasi Cara Perbenihan Ikan Yang Baik (CBIB)	Jumlah UPR/UPTD BBI yang dibina (unit)	10,00	6,00	2,00	2,00	100,00			
48	Sosialisasi dan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan sertifikasi (orang)	10,00	6,00	2,00	2,00	100,00			
49	Pembinaan Perijinan Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budidaya	Jumlah kelompok yang terbina (kelompok)	5,00	3,00	1,00	1,00	100,00			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD mengacu pada indikator kinerja utama serta analisis kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta analisis Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan 2016-2021.

Berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Renstra untuk Tahun 2020, ada beberapa indikator yang capaiannya naik dari pada tahun sebelumnya seperti Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Jumlah Produksi dan Jumlah Produksi Benih), Angka Konsumsi Ikan, Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku dan Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam kegiatan Pengawasan SDKP.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka disusun suatu Rancangan Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 seperti dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	Target SPM/ standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD (2017-2021)					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020**	2021	2020	2021	
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)			130.526,10	130.526,10	130.526,10	130.526,10	130.526,10	152.789,30	133.526,01	133.526,01	134.017,98		130.526,10	130.526,10	
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)			85.173,26	97.276,39	110.842,40	116.384,52	119.876,05	79.271,03	98.151,88	101.857,32	103.385,18		116.384,52	119.876,05	
3	Jumlah produksi benih (ekor)			59.500.000	61.343.000	64.410.000	67.630.000	70.335.000	60.180.000	61.956,43	38.260,56	38.260,56		67.630.000	70.335.000	
4	Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)			47,59	48,1	48,61	49,12	49,63	46,95	49,30	53,30	53,30		49,12	49,63	
5	Tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut (dokumen)			1	1	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00		0	0	
6	Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)			171.679	171.679	171.679	171.679	171.679	61.362	61.362,15	61.362,15	61.362,15		171.679	171.679	
7	Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	
8	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)			75	78	80	85	87	70	78,00	80,00	85,00		85	87	
9	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Polmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)			25	30	40	40	40	22	30,00	41,00	40,00		40	40	

CATATAN : ** data sangat sementara

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pencapaian IKU ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku, khususnya upaya penertiban perijinan dan pelaksanaan usaha kelautan dan perikanan, kendala yang dihadapi adalah ketika upaya penegakan hukum berjalan namun upaya perbaikan/ pembenahan terhadap RTP/ pelaku usaha yang teridentifikasi bermasalah tidak seimbang, maka usaha pembinaan tidak akan berjalan baik, mengingat solusi tidak komprehensif. Hal ini terlihat dengan banyaknya penentangan kebijakan pemerintah terkait aturan ini, di wilayah lain di Indonesia yang juga menggambarkan kondisi yang sama terjadi di Kalimantan Tengah. Terkait dengan permasalahan ini, sebenarnya keterkaitan lintas sektor dan unit pelaksana teknis di lingkup kelautan dan perikanan sangat erat kaitannya. Selain upaya penegakan hukum yang memang telah dituliskan, upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam hal perijinan dan akses keuangan, sebagai salah satu jalan menuju pelaku perikanan yang mandiri dan berdaya saing, dapat dijalankan untuk mencapai IKU ini.

Hampir keseluruhan POKMASWAS yang ada di Kalteng termasuk ke dalam kategori tidak aktif dan mandiri, mengingat data yang menunjukkan hanya 1 atau bahkan 2 POKMASWAS saja yang secara rutin melakukan fungsinya dan berkoordinasi aktif dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. Kondisi ini lebih dikarenakan masih rendahnya kesadaran unsur POKMASWAS itu sendiri, yang juga sebenarnya merupakan pelaku usaha perikanan, mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya. Apabila dikaji lebih mendalam, sebagaimana literatur terkait dengan masalah ekonomi, ketergantungan terhadap keberadaan sumberdaya perikanan harus dipahami oleh unsur kelompok sebagai kebutuhan yang utama, artinya kerusakan atau menurunnya produktifitas sumberdaya perikanan harus dapat ditafsirkan sebagai suatu langkah mula terjadinya ancaman terhadap pemasukan bagi pelaku perikanan itu sendiri. Jika diartikan dalam bentuk program/ kegiatan, diperlukan pelaksanaan yang dapat secara simultan dapat membuka pemahaman unsur anggota POKMASWAS mengenai arti penting kelestarian sumberdaya ikan, sekaligus memahami potensi ekonomi dari sektor perikanan bagi kelompok/ individunya.

Target pencapaian untuk indikator Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir sebesar 2,5 Ha masih bisa dicapai mengingat terdapat kegiatan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL) terkait pemasangan sabuk pantai sintetis (*geo tube*) di daerah Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur yang teridentifikasi masuk kategori rusak berat akibat abrasi. Namun terdapat langkah bersama yang tetap

harus dijalan di lapangan, yaitu terkait peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kaitan fungsi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan, sebagian besar kerusakan terjadi akibat pemanfaatan kawasan pesisir tidak memperhatikan kaidah lingkungan dan ketataruangan/zonasi.

Dari berbagai potensi dan permasalahan kelautan dan perikanan yang muncul, maka dapat disimpulkan permasalahan yang memerlukan penanggulangan secara tepat dan komprehensif. Terkait dengan hal dimaksud, berikut ini formulasi isu penting dan strategis beserta rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang sekiranya dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran Tahun 2019 maupun tahun berikutnya.

ISU STRATEGIS	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan pemberdayaan RTP/ pelaku usaha	Pelaksanaan gelar operasi pengawasan, disertai dengan sosialisasi peraturan perundangan dan pelaksanaan pendataan serta perijinan	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang bersinergi dengan pelaksanaan sosialisasi perijinan dan gerai perijinan sektor kelautan dan perikanan yang <i>mobile</i>.• Pendataan yang ditindaklanjuti dengan perijinan melalui Kegiatan Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap• Penggantian secara berangsur alat tangkap yang teridentifikasi tidak ramah lingkungan• Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai dan intensif di lapangan
Perlunya peningkatan kesadaran unsur POKMASWAS dalam menjaga kelestarian sumberdaya	<ul style="list-style-type: none">• Penyadaran arti pentingnya keberdaan sumberdaya yang lestari, disertai upaya tegas penegakan hukum.• Mata pencaharian alternatif bagi unsur POKMASWAS dapat memberikan jaminan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• Pelibatan unsur POMASWAS dalam upaya/ kegiatan gelar operasi yang bersinergi dengan pelaksanaan sosialisasi perijinan• Pelaksanaan penilaian POKMASWAS beserta <i>reward and punishment</i>.

Perlunya upaya terpadu dalam penataan pemanfaatan kawasan pesisir dengan memperhatikan kaidah lingkungan dan ketataruangan/ zonasi

- Penegakan hukum
- Pemberdayaan masyarakat lokal dalam menjaga melestarikan kawasan pesisir

- Pelaksanaan Pelatihan Akses Permodalan dan Panyadaran Pengelolaan Kawasan Pesisir
- Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Kalimantan Tengah
- Pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi mengenai penyelamatan dan pelestarian pesisir

Perlunya upaya terpadu dan lintas sektor terkait peningkatan akses keuangan/ permodalan dari pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan

- Sosialisasi akses keuangan/ permodalan
- Kemudahan penjaminan

- Kerjasama lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan (BUMD) salah satunya melalui Kegiatan Fasilitas Perusda/BUMD Untuk Bermitra Dengan Pengusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
- Sertifikasi tanah nelayan dan pembudidaya ikan, serta asuransi bagi pelaku usaha perikanan
- Optimalisasi fungsi UPTD dan satuan pelayanan teknis dalam memberikan pelayanan kepada nelayan dan pembudidaya
- Pengembangan sentra perikanan terpadu berbasis sumberdaya lokal di masing-masing kabupaten/ kota

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terkait dengan adanya Rancangan Awal RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan analisis kebutuhan ada beberapa hal yang turut mempengaruhi Rancangan Awal RKPD antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Tahun 2021 sudah dilaksanakan penerapan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terjadinya perubahan nomenklatur, klasifikasi urusan, dan pelimpahan kewenangan. Terkait dengan hal dimaksud antara lain :
 - Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk menangani perikanan budidaya air tawar sudah dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan/Dinas Perikanan Kabupaten/Kota
 - Optimalisasi data dan perijinan sektor perikanan tangkap yang diharapkan *up to date* dan bermanfaat bagi daerah, sehingga dipandang

perlu menambahkan penganggaran operasional pengumpulan dokumen dan data izin kapal perikanan pada Kegiatan Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap.

- Agar IKU terkait Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mencapai target yang diinginkan maka diperlukan penambahan penganggaran kepada kegiatan yang secara langsung untuk mendukung pencapaian target.
2. Peningkatan/ optimalisasi fungsi UPTD/ balai/ satuan pelayanan teknis dinas yang secara langsung bersentuhan dengan nelayan dan pembudidaya ikan. Adapun beberapa hal terkait antara lain :
 1. Pada Tahun 2021 diharapkan UPTD/ balai/ satuan pelayanan teknis dapat secara optimal melakukan pengembangan komoditas unggulan pada daerah masing-masing, termasuk pembinaan kepada pembudidaya di wilayah kerjanya. Dalam rangka optimalisasi dimaksud, dilakukan penambahan biaya operasional di UPTD/ balai/ satuan pelayanan teknis sehingga dapat mencapai target IKU.
 3. Peningkatan kualitas dan pengetahuan aparatur, terutama yang melaksanakan tugas dan fungsi UPTD/ balai/ satuan pelayanan teknis dinas. Beberapa hal dimaksud terkait maksud ini antara lain :
 1. Operasional UPTD/ balai/ satuan pelayanan teknis dinas berupa pelabuhan perikanan sangat erat kaitannya dengan berbagai jenis pelayanan kesyahbandaran. Memperhatikan hal tersebut, dilakukan penambahan anggaran pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mengikutsertakan aparatur dinas yang bertugas di pelabuhan perikanan potensial (untuk melakukan pelayanan kesyahbandaran pada nelayan dan pemanfaat pelabuhan perikanan) pada bimbingan teknis/ kursus tentang kesyahbandaran.

Secara detail, rincian penjelasan di atas pada komposisi penganggaran masing-masing program dan kegiatan disajikan pada Tabel 2.3.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan SKPD Provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kab/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada RKPD Tahun Anggaran 2021 seperti pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan pada Perubahan Anggaran Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Tengah

KODE	Program dan Kegiatan	PEMBIDANGAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	JUMLAH PAGU (Rp)	Catatan
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
	KOTAWARINGIN TIMUR					4.425.000.000	
3,01	Urusan Kelautan dan Perikanan					4.425.000.000	
3.01 - 21	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap					4.275.000.000	
3.01 - 21.32	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut					4.275.000.000	
	Bantuan Alat Dukung Penangkapan Ikan (Fish Finder) - Desa Bapinang Hilir	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	PULAU HANAUT	Tersedianya bantuan sarana penangkapan nelayan	10.00 unit	150.000.000	KAK, RAB, PROPOSAL
	Pengadaan Alat Tangkap Jaring Millenium 4 inci - Desa Lampuyang	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	TELUK SAMPIT	Tersedianya bantuan sarana penangkapan nelayan	150.00 pcs	525.000.000	KAK, RAB, PROPOSAL
	Pengadaan Alat Tangkap Gilnet dan Kapal Penangkap Ikan 5 GT - Desa Basirih Hilir	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	MENTAYA HILIR SELATAN	Tersedianya bantuan sarana penangkapan nelayan	1.00 paket	400.000.000	KAK, RAB, PROPOSAL
	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 10 GT - Desa Satiruk, Kelurahan Samuda Kota	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	PULAU HANAUT, MENTAYA HILIR SELATAN	Tersedianya bantuan sarana penangkapan nelayan	3.00 unit	3.000.000.000	KAK, RAB, PROPOSAL
	Pengadaan Alat Tangkap jaring ukuran 4 inci - Desa Regei Lestari, Desa Basawang	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	TELUK SAMPIT	Tersedianya bantuan sarana penangkapan nelayan	250.00 set	200.000.000	KAK, RAB, PROPOSAL
3.01 - 27	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan					137.500.000	
3.01 - 27.3	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan					137.500.000	
	Pengadaan Perahu Pengawas untuk PUD - Desa Palangan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	KOTA BESI	Tersedianya bantuan sarana pengawasan	5.00 unit	137.500.000	KAK, RAB, PROPOSAL
3.01 - 29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya					12.500.000	
3.01 - 29.24	Pengembangan Budidaya Ikan di Kawasan Minapolitan					12.500.000	
	Bantuan Bibit Udang (Benur) - Desa Satiruk	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	PULAU HANAUT	Tersedianya bantuan bibit untuk pembudidaya	150000.00 ekor	7.500.000	PROPOSAL

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

KODE	Program dan Kegiatan	PEMBIDANGAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	JUMLAH PAGU (Rp)	Catatan
	Bantuan Bibit Ikan Bandeng - Desa (Nener)	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	PULAU HANAUT	Tersedianya bantuan bibit untuk pembudidaya	50000.00 ekor	5.000.000	PROPOSAL
	KOTAWARINGIN BARAT					1.050.000.000	
3,01	Urusan Kelautan dan Perikanan					1.050.000.000	
3,01 - 21	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap					1.050.000.000	
3.01 - 21.32	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut					1.050.000.000	
	Kapal 10 Gt Lengkap Dengan Alat Tangkap	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	KUMAI	Tersedianya bantuan sarana penangkapan nelayan	5.00 Unit	750.000.000	
	Kapal 20 Gt Lengkap Dengan Alat Tangkap	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	KUMAI	Tersedianya bantuan sarana penangkapan nelayan	1.00 Unit	300.000.000	
	BARITO TIMUR					310.000.000	
3,01	Urusan Kelautan dan Perikanan					310.000.000	
3,01 - 21	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap					45.000.000	
3.01 - 21.45	Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan					45.000.000	
	Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumber Daya Ikan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	PAKU, AWANG, PAJU EPAT, BENUA LIMA, DUSUN TIMUR, RAREN BATUAH, DUSUN TENGAH, PEMATANG KARAU, KARUSEN JANANG, PATANGKEP TUTUI	Meningkatnya populasi ikan	50000.00 Ekor	45.000.000	KAK, RAB
3,01 - 25	Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan					60.000.000	
3.01 - 25.9	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil					60.000.000	

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

KODE	Program dan Kegiatan	PEMBIDANGAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	JUMLAH PAGU (Rp)	Catatan
	Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	PAKU, AWANG, PAJU EPAT, BENUA LIMA, DUSUN TIMUR, RAREN BATUAH, DUSUN TENGAH, PEMATANG KARAU, KARUSEN JANANG, PATANGKEP TUTUI	Tersedianya bantuan sarana pengolahan untuk masyarakat pengolah perikanan	2.00 Kelompok	60.000.000	KAK, RAB
3.01 - 27	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan					80.000.000	
3.01 - 27.6	Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan					80.000.000	
	Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	PAKU, AWANG, PAJU EPAT, BENUA LIMA, DUSUN TIMUR, RAREN BATUAH, DUSUN TENGAH, PEMATANG KARAU, KARUSEN JANANG, PATANGKEP TUTUI	Terlaksananya kegiatan sosialisasi penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan	2.00 Kali	80.000.000	KAK, RAB
3.01 - 29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya					125.000.000	
3.01 - 29.8	Gerakan Pakan Mandiri					25.000.000	
	Gerakan pakan mandiri	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	PAKU, AWANG, PAJU EPAT, BENUA LIMA, DUSUN TIMUR, RAREN BATUAH, DUSUN TENGAH, PEMATANG KARAU, KARUSEN JANANG, PATANGKEP TUTUI	Tersedianya bantuan sarana budidaya	1.00 Unit	25.000.000	KAK, RAB
3.01 - 29.16	Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil					100.000.000	
	Pemberdayaan Pembudidaya ikan skala kecil	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	PAKU, AWANG, PAJU EPAT, BENUA LIMA, DUSUN TIMUR, RAREN BATUAH, DUSUN TENGAH, PEMATANG KARAU, KARUSEN JANANG, PATANGKEP TUTUI	Tersedianya bantuan sarana budidaya	2.00 Paket	100.000.000	KAK, RAB

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

KODE	Program dan Kegiatan	PEMBIDANGAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	JUMLAH PAGU (Rp)	Catatan
	SUKAMARA					200.000.000	
3,01	Urusan Kelautan dan Perikanan					200.000.000	
3.01 - 21	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap					200.000.000	
3.01 - 21.32	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut					200.000.000	
	Pengadaan Jaring Ciker (Desa Sungai Tabuk)	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	PANTAI LUNCI	Tersedianya bantuan sarana penangkapan nelayan	1.00 paket	200.000.000	KAK, RAB, PROPOSAL
	PULANG PISAU					1.100.000.000	
3,01	Urusan Kelautan dan Perikanan					1.100.000.000	
3.01 - 29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya					1.100.000.000	
3.01 - 29.6	Pengembangan kawasan budidaya kolam dan karamba					400.000.000	
	Pembuatan Kolam Dalam	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	MALIKU, KAHAYAN HILIR	Tersedianya bantuan sarana budidaya	18.00 Buah	400.000.000	
3.01 - 29.16	Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil					700.000.000	
	Pengadaan Benih Ikan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	JABIREN RAYA, KAHAYAN HILIR, SEBANGAU KUALA	Tersedianya bantuan bibit untuk pembudidaya	475000.00 ekor	300.000.000	
	Pengadaan Pakan Ikan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	JABIREN RAYA, KAHAYAN HILIR, SEBANGAU KUALA	Tersedianya bantuan bibit untuk pembudidaya	22510.00 Kg	400.000.000	
	KAPUAS					1.220.000.000	
3,01	Urusan Kelautan dan Perikanan					1.220.000.000	
3.01 - 21	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap					100.000.000	
3.01 - 21.45	Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan					100.000.000	

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

KODE	Program dan Kegiatan	PEMBIDANGAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	JUMLAH PAGU (Rp)	Catatan
	Penebaran ikan dikawasan PUD (Restocking)	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	TIMPAH	Bertambahnya populasi ikan	50000.00 ekor	100.000.000	KAK, RAB
3.01 - 27	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan					1.120.000.000	
3.01 - 27.6	Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan					1.120.000.000	
	Pembuatan papan larangan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	KAPUAS MURUNG, KAPUAS TENGAH, SELAT, TIMPAH, DADAHUP, BATAGUH, MANTANGAI, PULAU PETAK, KAPUAS BARAT, KAPUAS KUALA	Tersedianya bantuan sarana sosialisasi penegakan hukum kelautan dan perikanan	22.00 unit	220.000.000	KAK, RAB
	Pembuatan papan larangan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	KAPUAS KUALA	Tersedianya bantuan sarana sosialisasi penegakan hukum kelautan dan perikanan	1.00 paket	900.000.000	KAK, RAB
	LAMANDAU					1.150.000.000	
3.01	Urusan Kelautan dan Perikanan					1.150.000.000	
3.01 - 21	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap					200.000.000	
3.01 - 21.34	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Perairan Umum Daratan					200.000.000	
	Alat tangkap ikan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	BULIK, LAMANDAU, SEMATU JAYA, BATANG KAWA, BULIK TIMUR, BELANTIKAN RAYA	Tersedianya bantuan sarana penangkapan nelayan	1.00 paket	200.000.000	
3.01 - 29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya					950.000.000	
3.01 - 29.16	Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil					950.000.000	
	Mesin pengolah pakan ikan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	BULIK, MENTHOBİ RAYA	Tersedianya bantuan sarana budidaya ikan	2.00 unit	400.000.000	

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

KODE	Program dan Kegiatan	PEMBIDANGAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	JUMLAH PAGU (Rp)	Catatan
	Pengadaan benih ikan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	BULIK, DELANG, LAMANDAU, SEMATU JAYA, BATANG KAWA, BULIK TIMUR, MENTHOBI RAYA, BELANTIKAN RAYA	Tersedianya bantuan bibit untuk pembudidaya	1.00 paket	150.000.000	
	Pembangunan Percontohan Kolam Ikan Sistem Bioflok	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	DELANG, MENTHOBI RAYA	Tersedianya bantuan sarana budidaya ikan	1.00 paket	400.000.000	
	SERUYAN					4.000.000.000	
3,01	Urusan Kelautan dan Perikanan					4.000.000.000	
3.01 - 21	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap					3.500.000.000	
3.01 - 21.32	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut					3.500.000.000	
	Penyediaan kapal perikanan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	SERUYAN HILIR	Tersedianya bantuan sarana penangkapan nelayan	4.00 unit	1.000.000.000	KAK, RAB, Proposal
	Alat tangkap pengganti trawl	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	SERUYAN HILIR, SERUYAN HILIR TIMUR	Tersedianya bantuan sarana penangkapan nelayan	100.00 piece	2.500.000.000	KAK, RAB, Proposal
3.01 - 29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya					500.000.000	
3.01 - 29.16	Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil					500.000.000	
	Penyediaan mesin pakan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	HANAU, SERUYAN HILIR	Tersedianya bantuan sarana budidaya ikan	10.00 unit	500.000.000	KAK, RAB, Proposal
	KATINGAN					1.250.000.000	
3,01	Urusan Kelautan dan Perikanan					1.250.000.000	
3.01 - 29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya					1.250.000.000	
3.01 - 29.16	Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil					1.250.000.000	

RANWAL RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

KODE	Program dan Kegiatan	PEMBIDANGAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	JUMLAH PAGU (Rp)	Catatan
	Bantuan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	KAMPANG, TASIK PAYAWAN, KATINGAN HILIR, KATINGAN TENGAH	Tersedianya bantuan sarana budidaya ikan	5.00 kelompok	1.250.000.000	
	BARITO SELATAN					1.050.000.000	
3,01	Urusan Kelautan dan Perikanan					1.050.000.000	
3.01 - 21	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap					1.050.000.000	
3.01 - 21.34	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Perairan Umum Daratan					450.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Perairan Umum Daratan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	DUSUN SELATAN	Tersedianya bantuan sarana penangkapan nelayan	25.00 unit	450.000.000	KAK, RAB
3.01 - 21.45	Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan					600.000.000	
	Pengembangan Habitat Dan Perlindungan Sumber daya Ikan	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	JENAMAS, KARAU KUALA, DUSUN HILIR, DUSUN UTARA, DUSUN SELATAN	Bertambahnya populasi ikan	200000.00 ekor	600.000.000	KAK, RAB
						15.755.000.000	

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedaulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan Kelautan dan Perikanan yakni “*Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional*”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021. Pada Tahun 2020 ini kegiatan-kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sudah menggunakan acuan berdasarkan visi misi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021.

Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2016 - 2021 adalah : “***Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil***

untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”.

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud yang telah ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- Misi Kesatu : Pemantapan tata ruang wilayah provinsi.** Misi ini bertujuan Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas dengan sasaran terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.
- Misi Kedua : Percepatan pembangunan infrastruktur.** Misi ini bertujuan Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dengan sasaran untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
- Misi Ketiga : Pengelolaan sumberdaya air, pesisir dan pantai.** Misi ini bertujuan meningkatkan pembangunan di daerah pesisir dan pantai dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan nelayan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan nelayan di daerah pesisir Kalimantan Tengah.
- Misi Keempat : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.** Misi ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat Kalimantan Tengah.
- Misi Kelima : Pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, adil dan anti korupsi.** Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan di provinsi Kalimantan Tengah.
- Misi Keenam : Pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatkan peran sektor pariwisata di provinsi Kalimantan Tengah.
- Misi Ketujuh : Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas

lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Tengah baik lingkungan kawasan hutan, perairan serta sumberdaya alam lainnya yang tidak terbarukan.

Misi Kedelapan : Pengelolaan Pendapatan Daerah. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan pembagian kewenangan prioritas pembangunan daerah melalui sektor yang ada, Dinas Kelautan dan Perikanan dihubungkan secara langsung kepada **Misi Ketiga** yaitu **Pengelolaan Sumberdaya Air, Pesisir dan Pantai** yang dalam RPJMD dijelaskan bahwa terkait potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah berupa garis pantai sepanjang 750 km yang menghadap ke laut Jawa dan terdapat pada 7 (tujuh) kabupaten, yakni: Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas, dan tempat bagi para nelayan untuk mencari penghidupan, maka sumber daya air, pesisir dan pantai merupakan potensi penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun 2016 – 2021 yaitu ***Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah.***

Sebagai wujud dari tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan selama 5 tahun, dimana Tahun 2020 merupakan salah satu tahapan tahun yang harus dipenuhi, maka sasaran strategis pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2020 yang ingin dicapai meliputi :

1. Misi Pertama adalah Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal, yang mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - Meningkatkan produksi perikanan tangkap;
 - Meningkatkan produksi perikanan budidaya
2. Misi Kedua adalah Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tujuan sebagai berikut:
 - Meningkatkan konsumsi terhadap produk hasil perikanan.

3. Misi Ketiga adalah Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Mengoptimalkan Pengelolaan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditarik sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Arah dari misi pertama adalah Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal, memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai misi tersebut yaitu :
 - a. Tujuan pertama, Meningkatkan produksi perikanan tangkap. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : jumlah produksi perikanan tangkap (indikator : produksi perikanan tangkap dalam ton/tahun).
 - b. Tujuan kedua, Meningkatkan produksi perikanan budidaya. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi benih (indikator : produksi perikanan budidaya dalam ton/tahun dan produksi benih dalam ekor/tahun).
2. Arah dari misi kedua adalah Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, memiliki tujuan dan sararan untuk mencapai misi tersebut yaitu :
 - a. Tujuannya adalah Meningkatkan konsumsi terhadap produk hasil perikanan. Tujuan tersebut di capai dengan sasaran: angka konsumsi ikan (indikator : konsumsi ikan masyarakat Kg/Kapita/tahun)
3. Arah dari misi ketiga adalah Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, memiliki tujuan dan sararan untuk mencapai misi tersebut yaitu :
 - a. Tujuan pertama, Mengoptimalkan pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : Dokumen kebijakan pengelolaan wilayah

pesisir dan laut, jumlah luasan konservasi perairan dan jumlah luasan rehabilitasi kawasan (indikator : dokumen, luasan konservasi perairan dalam ha/tahun dan luasan rehabilitasi kawasan pesisir ha/tahun);

- b. Tujuan kedua, Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tujuan tersebut dicapai dengan sasaran : Kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan dan UU yang berlaku dan POKMASWAS yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (indikator : persentase dan jumlah POKMASWAS)

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Indikator dan Target Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Visi: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah										
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 1: Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal										
1	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi (Ton/tahun)	130.526,1	130.526,1	130.526,1	130.526,1	130.526,1	130.526,1	130.526,1
2	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi (Ton/tahun)	68.693,70	74.854,47	85.173,26	97.276,39	110.842,40	116.384,52	119.876,05
			Jumlah Produksi Benih (Ekor/tahun)	55.620 ribu	57.330 ribu	59.500 ribu	61.343 ribu	64.410 ribu	67.630 ribu	70.335 ribu
Misi 2: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan										
3	Meningkatkan Konsumsi Terhadap Produk Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan/Kap/ Tahun	46,35	47,09	47,59	48,10	48,61	49,12	49,63
Misi 3: Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan										
4	Mengoptimalkan Pengelolaan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Konservasi Perairan	Jumlah Luasan Konservasi Perairan (Ha/tahun)	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679
		Luasan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Jumlah Luasan Rehabilitasi Kawasan Pesisir (Ha/tahun)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					Target Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)	70	70	75	78	80	85	87
		POKMASWAS yang berperan dalam kegiatan Pengawas SDKP	Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP (kelompok/ tahun)	22	22	25	30	40	40	40

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus atau prioritas capaian dari waktu ke waktu. Mengingat bahwa semua program adalah merupakan kesinambungan dalam rangka penuntasan maka umumnya program yang ada dimulai dari tahun pertama yakni tahun 2016. Beberapa program tetap diteruskan sampai dengan tahun 2021 namun ada juga program yang hanya dilaksanakan dalam satu atau dua tahun.

Seperti diuraikan di atas, semua program pada dasarnya adalah merupakan kesinambungan dari program-program sebelumnya, sehingga pelaksanaannya dimulai dari tahun pertama yakni tahun 2016. Namun karena fokus pembangunan daerah 2016-2021 disesuaikan dengan misi yang ada maka untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal perlu dilakukan beberapa penataan antara lain pembuatan dan penyempurnaan regulasi, pembuatan dan penyempurnaan berbagai dokumen perencanaan sebelum pelaksanaannya dimulai.

Beberapa fokus prioritas yang harus dilaksanakan pada tahap ini, meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah
- 2) Pemerataan infrastruktur wilayah
- 3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai
- 4) Stabilitas ekonomi daerah
- 5) Peningkatan pendapatan masyarakat
- 6) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi
- 7) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
- 8) Pengelolaan industri pariwisata
- 9) Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan
- 10) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapat Asli Daerah (PAD)

4.2. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi

merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Visi: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Optimal				
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan Tangkap	Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan dan perbaikan sarana dan prasarana perikanan tangkap 2. Pengelolaan sumber daya ikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan perikanan tangkap
2.	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya dan produksi benih	Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi konsumsi ikan masyarakat dengan sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya dan produksi benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan sarana prasarana untuk menunjang produksi perikanan budidaya 2. Peningkatan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan perbenihan pada UPTD/UPR
Misi 2: Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				
1.	Meningkatkan konsumsi terhadap produk hasil perikanan	Angka konsumsi ikan	Peningkatan rata-rata konsumsi ikan masyarakat secara merata dan berimbang	Memasyarakatkan konsumsi ikan dan produk olahannya melalui pengembangan dan pengolahan usaha pengolahan perikanan

Visi: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan Menuju Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3: Peningkatan Upaya Pengelolaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
1.	Mengoptimalkan pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan	Pengoptimalan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, jumlah luasan konservasi perairan dan jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir	Penataan dan pemanfaatan wilayah laut dan pesisir secara berkelanjutan dan lestari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kebijakan pemerintah tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut 2. Pengelolaan dan penataan kawasan konservasi 3. Rehabilitasi pantai
2.	Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan dan UU yang berlaku dan jumlah POKMASWAS yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP	Meningkatkan ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengembangan sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan pembinaan dalam penegakan hukum dan pengendalian IUU 2. Pembinaan POKMASWAS

Tabel 4.2. Hubungan Program, Kegiatan dan Indikator Hasil Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Program	Kegiatan	Indikator Hasil
1.	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)
		Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan perairan laut	<i>Jumlah sarana penangkapan ikan bagi nelayan perairan laut yang disediakan</i>
		Peningkatan kapasitas sarana penangkapan nelayan Perairan Umum Daratan (PUD)	<i>Jumlah sarana penangkapan ikan bagi nelayan perairan umum yang disediakan</i>
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	<i>Jumlah Sarpras pengelolaan pelabuhan perikanan yang disediakan</i>
		Monitoring Evaluasi Sumberdaya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI	<i>Jumlah laporan pelaksanaan monitoring keberadaan sumberdaya ikan di perairan yang disusun</i>
		Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan pengelolaan perairan umum daratan dan laut	<i>Jumlah kelompok pengelolaan SDI di PUD yang dibentuk</i>
		Pembinaan perizinan usaha perikanan tangkap	<i>Jumlah perijinan perikanan tangkap yang dikelola dengan baik</i>
		Pengembangan habitat dan perlindungan sumberdaya ikan	<i>Jumlah perijinan perikanan tangkap yang dikelola dengan baik</i>
		Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitasi Pokok dan Fungsi Pelabuhan Perikanan (DAK)	<i>Jumlah Sarpras dermaga yang dibangun/direhab</i>
		Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kumai	<i>Jumlah bulan layanan kepelabuhanan perikanan</i>
		Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang	<i>Jumlah bulan layanan kepelabuhanan perikanan</i>

No.	Program	Kegiatan	Indikator Hasil
2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	<p>Peningkatan sarana dan prasarana dan operasional BBIP Ujung Pandaran</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana dan operasional BBUG Kumai</p> <p>Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil</p> <p>Pembinaan Pembudidaya/Monev UPTD/Balai</p> <p>Sosialisasi dan Sertifikasi CBIB</p>	<p>- Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)</p> <p>- Jumlah Produksi Benih</p> <p><i>Jumlah benih yang dihasilkan</i></p> <p><i>Jumlah benih yang dihasilkan</i></p> <p><i>Jumlah bantuan yang diberikan bagi kelompok pembudidaya pemula</i></p> <p><i>Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring UPTD perikanan budidaya</i></p> <p><i>Jumlah kelompok perikanan budidaya yang dilakukan pembinaan terkait sertifikasi CBIB</i></p>
3.	Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan	<p>Gerakan memasyarakatkan makan ikan</p> <p>Pengembangan usaha pengolahan perikanan skala kecil</p> <p>Pameran dan promosi produk hasil perikanan</p> <p>Operasi pasar</p> <p>Sertifikasi kelayakan pengolahan bagi unit pengolahan ikan</p>	<p>Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)</p> <p><i>Jumlah masyarakat yang ikut serta dalam gerakan memasyarakatkan makan ikan</i></p> <p><i>Jumlah kelompok unit pengolahan skala kecil yang mendapatkan bantuan</i></p> <p><i>Jumlah keikutsertaan dinas dalam rangka pameran dan promosi produk perikanan</i></p> <p><i>Jumlah ikan segar yang dipasarkan dalam rangka keikutsertaan dalam kegiatan pengendalian inflasi di Kalteng</i></p> <p><i>Jumlah Unit Pengolah Ikan yang difasilitasi sertifikasi kelayakan pengolahannya</i></p>

4. **Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir**

Pencadangan kawasan konservasi perairan darat dan laut

Pelatihan Akses Permodalan Masyarakat Pesisir

Penataan Kawasan Wilayah Pesisir

Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut

- **Jumlah luasan konservasi perairan (Ha)**
- **Jumlah luasan rehabilitasi kawasan pesisir (Ha)**

Jumlah kawasan konservasi yang dikelola saprasnya

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan akses permodalan dan penyadaran pengelolaan kawasan pesisir

Jumlah luasan kawasan yang direhabilitasi

Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam rangka penyusunan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut

5. **Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan

- **Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan/ UU yang berlaku (%)**
- **Jumlah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP (kelompok)**

Jumlah sarana dan prasarana pengawasan yang diadakan

Jumlah POKMASWAS yang menerima pembinaan dalam rangka keaktifan melakukan pengawasan

Jumlah operasi pengawasan yang dilaksanakan

Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi penanganan tindak pidana perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah Tahun 2019, dilaksanakan melalui program-program pembangunan, dimana program tersebut secara teknis sejalan dengan program kementerian Kelautan dan Perikanan, serta program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun program – program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 4 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- 5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 6 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 7 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 8 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 9 Penyediaan alat tulis kantor
- 10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 11 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 14 Penyediaan makanan dan minuman
- 15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk Meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2 Pengadaan Meubelair
- 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
- 6 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
- 7 Pengadaan komputer
- 8 Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk Meningkatkan Disiplin kerja Aparatur dalam penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 2 Pengadaan Pakaian Batik Tradisional

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 4.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dimaksudkan meningkatkan pertanggungjawaban kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 3 Penyusunan RKA-SKPD
- 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 5 Penyusunan LAKIP
- 6 Penyusunan renja SKPD
- 7 Penyusunan Laporan Tahunan Dinas
- 8 Penyusunan LKPJ dan LPPD
- 9 Penyusunan Laporan Data Statistik Perikanan

6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan penatausahaan dan inventarisasi pengelolaan aset/barang daerah yang dimiliki oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- 6.1. Pengelolaan Inventaris Barang Daerah

7. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan, dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap (volume dan nilai) dan peningkatan Nilai Tukar Nelayan. Untuk mencapai tujuan tersebut

kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
- 2 Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Nelayan Perairan Laut
- 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
- 4 Monitoring Evaluasi Sumber Daya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI
- 5 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perairan Umum Daratan dan Laut
- 6 Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
- 7 Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan
- 8 Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsi Pelabuhan Perikanan (DAK)
- 9 Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kumai
- 10 Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang
- 11 Pelatihan Diversifikasi Usaha Perikanan Tangkap
- 12 Peningkatan Kelembagaan KUB

8. Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan

Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, dengan sasaran peningkatan volume produk olahan, peningkatan rata-rata konsumsi ikan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut diatas, Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
- 2 Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil
- 3 Pameran dan promosi produk perikanan
- 4 Operasi Pasar
- 5 Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Bagi Unit Pengolahan Ikan

9. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir

Tujuan Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah laut dan wilayah pesisir secara berkelanjutan dan lestari, dengan sasaran peningkatan luasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan dan jumlah kawasan pesisir yang rusak pulih kembali, untuk mencapai tujuan program tersebut, dilaksanakan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah :

- 1 Penataan Kawasan Wilayah Pesisir
- 2 Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut
- 3 Rehabilitasi dan Ekstensifikasi Terumbu Karang
- 4 Jenis - Jenis Ikan Laut, Terumbu Karang dan Padang Lamun di Kawasan Konservasi
- 5 Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan Konservasi
- 6 Adopsi Teknologi dan Pembelajaran ke Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Laut
- 7 Pembinaan Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi
- 8 Identifikasi/Inventarisasi Potensi Limbah Hasil Perikanan Yang Dapat Dimanfaatkan Ulang di Kawasan Pesisir
- 9 Adopsi Teknologi dan Pembelajaran ke Pengrajin/Komunitas Pengolah Limbah Hasil Perikanan
- 10 Pembentukan Kelompok dan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Hasil Perikanan di Wilayah Pesisir
- 11 Pembinaan Kelompok Wanita Pengolah Limbah Hasil Perikanan Di Kawasan Wisata Ujung Pandaran
- 12 Koordinasi/Evaluasi/Pembinaan Terkait Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan Dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Pesisir
- 13 Gerakan Bersih Pantai dan Penanaman Mangrove di Wilayah Pesisir
- 14 Penyusunan Rencana Pengelolaan Wisata Mangrove

10. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini bertujuan untuk Terwujudnya Kedaulatan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang profesional dan Partisipatif (indikator : jumlah POKMASWAS bidang Kelautan dan Perikanan yang menerima bantuan; persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku; jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan secara Akuntabel dan Tepat Waktu), kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- 1 Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan
- 2 Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan
- 3 Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak
- 4 Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 5 Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan
- 6 Penanganan Konflik Nelayan
- 7 Pembentukkan Kelembagaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya

Program ini dimaksudkan untuk Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri dan ekspor, dengan sasaran peningkatan produksi, Peningkatan produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya (volume dan nilai), Peningkatan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTBi) untuk mencapai sasaran program tersebut kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1 Pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil
- 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran
- 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai
- 4 Pendataan dan Pembinaan Kelompok Pembudidaya Di Kawasan Pesisir Dan Laut
- 5 Gerakan Pakan Mandiri Di Kawasan Pesisir Laut
- 6 Pembinaan dan Pendampingan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) Di Kawasan Pesisir Dan Laut
- 7 Pengumpulan dan Pengelolaan Data Sasaran dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya
- 8 Pengembangan Budidaya Di Kawasan Pesisir Dan Laut
- 9 Koordinasi dan Monitoring Ke UPTD/UPR/Pembudidaya Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Di Kawasan Pesisir Laut
- 10 Potensi dan Peluang Investasi Pengembangan Perikanan Budidaya
- 11 Pendampingan dan Monev Bantuan Pemerintah
- 12 Pembinaan dan Bimbingan Teknis dan Pembekalan Kepada Kelompok Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI)
- 13 Pembinaan UPR/UPTD BBI Dalam Rangka Sertifikasi Cara Perbenihan Ikan Yang Baik (CBIB)
- 14 Sosialisasi dan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
- 15 Pembinaan Perijinan Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budidaya

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada tabel 4.1.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini merupakan usulan Rencana Operasional Fasilitas Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta target dan Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

Rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan Kelautan dan Perikanan yang bersumber anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam penyusunan rancangan renja telah mengakomodir aspirasi stake holder Kelautan dan Perikanan dan usulan kegiatan dari Unit Pelaksana Teknis yang membidangi fungsi Kelautan dan Perikanan se Kalimantan Tengah. Aspirasi stake holder dan usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota menjadi bahan penyusunan dalam penetapan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dan pagu indikasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Tengah.

Dengan adanya Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, maka penetapan prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, baik dengan sesama Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi fungsi Kelautan dan Perikanan maupun dengan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.